Investor Daily/ANT

Kerja Sama Mandiri - BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil (kiri) berjabat tangan dengan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo usai penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin (4/6). Bank Mandiri menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyediakan layanan perbankan guna memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui fasilitas Mandiri Internet Banking, Mandiri ATM, Cabang Bank Mandiri dan Mini ATM/Electronic Data Capture (EDC).

Totalindo akan Terbitkan MTN Rp 500 M

Oleh **Grace Eldora**

▶ JAKARTA - PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) berencana menerbitkan surat utang jangka menengah (*medium term notes*/MTN) sebesar Rp 500 miliar. Perseroan telah mengantongi persetujuan pemegang saham untuk rencana penerbitan tersebut, namun diperkirakan penggalangan dana akan dilakukan akhir tahun ini.

Direktur Independen Totalindo Eko Wardoyo mengatakan, selama ini perseroan mendapat dana dari pinjaman perbankan namun melihat peluang baru untuk alternatif pendanaan lainnya. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembiayaan proyek baru dari tender yang dimenangkan.

Nantinya, pendanaan tersebut akan diseimbangkan dengan pinjaman perbankan. "Kami pikir bagaimana caranya (pendanaan) lebih cepat, maka MTN dibandingkan obligasi. Plafon perbankan ada, cepat, bunganya 10% atau sekitar 10,5% tidak jauh beda dengan MTN," ujar Eko di Jakarta, Senin (4/6).

Adapun proyek eksisting perseroan dalam bidang usaha developer yakni transit oriented development (TOD) Lebak Bulus dan TOD Klapa Village membutuhkan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sekitar Rp 130 miliar.

Selain itu, perseroan masih memiliki 18 proyek high-rise building yang belum rampung sebesar senilai lebih dari Rp 9,67 triliun. "Saat ini belum detil kebutuhannya, baru minta persetujuan. Tunggu perhitungan dan kebutuhan berapa, baru (MTN) jalan," lanjutnya.

Kontrak Baru

Sementara itu, dari target kontrak baru 2018 sebesar Rp 4,01 triliun, sebesar 51,69% atau sekitar Rp 2,07 triliun telah dipegang pada kuartal I-2018. Pada semester II-2018, kontrak baru yang telah ada pada pipeline perseroan mencapai Rp 3 triliun. "Kami belum pertimbangkan revisi target walaupun di pipeline sudah melebihi," imbuhnya.

Ia berharap kontrak dapat diperoleh lebih cepat sehingga pihaknya dapat memulai pengerjaan dan masuk pada revenue recognition 2018. Totalindo tengah mengikuti beberapa tender proyek pemerintah, salah satunya tengah menunggu pengumuman dan pada proyek lainnya perseroan tengah menunggu undangan kementerian terkait.

Hingga kuartal I-2018, mayoritas merupakan kontrak dari proyek pemerintah sebesar 70% atau Rp 1,38 triliun dan proyek swasta 30% sekitar Rp 693 miliar. Sementara proyek pemerintah terdiri atas TOD Lebak Bulus senilai Rp 900 miliar, proyek DP 0% senilai Rp 320 miliar, proyek Gedung Twin Tower Asrama Jawa Barat senilai Rp 56 miliar, Rusunawa DIY senilai Rp 106 miliar, dan Antasari Height senilai Rp 693 miliar.

Pendapatan berlanjut (carry over) perseroan pada kuartal II-2018 mencapai Rp 800-900 miliar, dari TOD Klapa Village dan TOD Lebak Bulus yang belum dibukukan di kuartal I-2018. Direktur Totalindo Andre Chandra Biantoro mengatakan, tahun ini perseroan menargetkan penyetaraan nilai proyek milik pemerintah dan swasta masing-masing 50% dari total kontrak.

"Sekarang di pipeline Rp 3 triliun sedang tender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Synthesis Development dan Ciputra Group sedang negosiasi support di infrastruktur tol dalam kota untuk enam ruas," tambahnya. Dari enam ruas tersebut, tahap pertama ruas Sunter-Pulau Gebang telah berjalan.

Nantinya, perseroan akan masuk sebagai sub kontraktor bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) untuk pengerjaan pier end jembatan.

Eko menegaskan, pihaknya akan fokus pada dua proyek yakni TOD Lebak Bulus dan dan proyek rumah down payment (DP) Rp 0. Proyek rumah tersebut memakan biaya konstruksi sekitar Rp 600 miliar, terdiri atas empat tower, yakni dua tower diperuntukkan bagi program DP Rp 0 dan dua tower lainnya akan dibangun menyusul akhir tahun ini.

"Sementara belum, masih menunggu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Target Pemprov sebelumnya Mei 2018, kita tunggu setelah lebaran mulai kerja dan tahun depan jadi. Nanti yang jualan Unit Pelaksana Teknis (UPT)," lanjut dia. Eko memperkirakan pengerjaan akan selesai dalam 15 bulan, fokus pada pengerjaan dua tower pertama.

Sedangkan pada proyek TOD akan mulai launching pada akhir tahun sekaligus memulai proses groundbreaking. Saat ini proyek masih dalam tahapan desain dan menunggu perizinan. Di pihak lain, perseroan mengikuti tender proyek tol di Makassar dan tol dalam kota sebagai sub kontraktor bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan Jaya Konstruksi.

Di Manado, perseroan berencana mengembangkan proyek resort dalam jangka waktu panjang. Tahun ini perseroan akan melihat peluang diversifikasi kegiatan usaha dengan memulai penetrasi ke sektor infrastruktur. Menurut Eko, sementara ini porsi infrastruktur terhadap kontrak baru perseroan belum mencapai 10%.

Hanson Jajaki Emisi Obligasi Hingga Rp 1 Triliun

JAKARTA - PT Hanson International Tbk (MYRX) menjajaki penggalangan dana melalui emisi obligasi pada awal tahun depan. Total dana yang dibidik berkisar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.

Sebagian besar perolehan dana dari aksi korporasi tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai akuisisi lahan dan sisanya untuk restrukturisasi (*refinancing*) utang perbankan. *Corporate Finance & Investor Relations* Hanson International Hermawan Raharjo mengatakan, profil obligasi dinilai cocok untuk memperpanjang tenor pinjaman, sesuai dengan sifat bisnis properti memiliki *return* jangka panjang.

Sebagai penerbit baru dalam obligasi, dia menjelaskan, perseroan perlu menyasar target dana besar agar lebih diminati investor dan perdagangannya lebih likuid. Namun demikian, emisi tersebut masih menunggu keputusan manajemen dan kondisi pasar modal.

"Kami menerbitkan obligasi agar beban bunga prseroan lebih murah dan tenor panjang, karena rata-rata bunga perbankan 12-14%. Jika berhasil menerbitkan obligasi, beban bunga tersebut bisa diturunkan lagi," tuturnya di Jakarta, baru-baru ini.

Pihaknya mencatat bahwa beban bunga kredit properti masih tergolong tinggi, dibandingkan kredit lainnya. Sedangkan margin produk rumah tapak milik perseroan hanya sekitar 25-30%, dibandingkan rumah tapak mewah bisa menghasilkan margin sekitar 70%.

Saat ini, Hanson International menggarap properti kelas menengah ke bawah dengan tiga proyek eksisting yang berada di empat lokasi lahan. Ketiga proyek tersebut, antara lain kota mandiri Millenium City Serpong sekitar Rp 800-900 juta per unit rumah, Citra Maja Raya Banten sekitar Rp 100-200 juta, dan Forest Hill Parung Panjang senilai sekitar Rp 300-500 juta.

Sementara itu, Komisaris Utama Hanson International Benny Tjokrosaputro mengatakan, pihaknya melakukan ekspansi sebesar dua kali lipat dari luas lahan yang dijual ke pihak lain. Hingga akhir tahun ini, perseroan memperkirakan akan melakukan akuisisi terhadap lahan seluas 600-700 hektare (ha).

Sedangkan penjualan unit properti (*marketing sales*) diharapkan mencapai Rp 1-1,5 triliun dengan target agresif mencapai Rp 2 triliun. Per April 2018, *marketing sales* yang telah dibukukan mencapai sekitar Rp 300 miliar. **(eld)**

Investor Ritel Tolak Rencana *Reverse Stock* Bakrieland

JAKARTA – Sekelompok investor ritel yang menggenggam 4,28 miliar unit atau sekitar 10% saham PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) menolak rencana *reverse stock* 10:1. Pasalnya, aksi korporasi itu dinilai merugikan hak dari pemegang saham publik.

Perwakilan Forum Investor Penolak Reverse Stock ELTY (Forty) dan investor ritel, Hidayat menyatakan, pihaknya masih terus melakukan pendataan dan menerima investor lain yang menolak rencana Bakrieland Development. Sampai sore hari kemarin, menurut dia, investor ritel yang bergabung ke Forty menggenggam saham sekitar 10% dari total 43 miliar saham beredar dari emiten berkode ELTY itu.

Secara jumlah naik cukup signifikan, karena pada 2 Juni 2018 baru setara dengan 5%. "Meski demikian anggota kami masih terus bergerilya menggumpulkan investor atas saham Bakrieland Development lainnya. Mewakili Forty, saya berharap, jumlah investor yang bergabung dapat terus bertambah pada 2-3 minggu ke depan," ujar Hidayat di Jakarta, Senin (4/6).

Adapun melalui keterangan tertulis yang diberikan Forty kepada kalangan media, forum tersebut terbentuk pada 31 Mei 2018. Saat itu, jumlah investor ritel yang menolak rencana pelaksanaan *reverse stock* Bakrieland Development sudah mendekati 1.000 investor.

Dalama keterangan resmi tersebut, Forty mengaku, berniat mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menuntut pembatalan rencana aksi korporasi Bakrieland Development. Menurut Forty, rencana reverse stock dari emiten properti berkode saham ELTY, justru merugikan investor, dan cenderung berlawanan dengan program Yuk Nabung Saham.

Hidayat menjelaskan, anggota Forty berharap bahwa regulator dapat mengabulkan tuntutan dari para investor ritel, dan bersikap adil. "Kami yakin, jika OJK bisa membatalkan rencana *reverse stock* Bakrieland Development itu dapat dapat menjadi bukti bahwa regulator mampu bersikap independen dan dapat dipercaya," tegas dia.

Adapun dia menyampaikan, aksi korporasi berupa reverse stock dulu pernah dilakukan oleh perusahaan yang masih satu grup dengan Bakrieland Developement. Berdasarkan catatan *Investor Daily,* pada 2017 PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP) melangsungkan*reverse stock* 10:1.

Untuk mencapai persetujuan, emiten tersebut menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) hingga tiga kali. "Beberapa aksi serupa di grup yang sama pernah dilakukan, dan membawa kejatuhan harga saham mulai dari 40-80% dalam waktu singkat," ujar Hidayat.

Terkait pendirian forum yang menentang rencana *reverse stock*, Sekretaris Perusahaan Bakrieland Development Yudy Rizard Hakimmenyatakan, pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut. Namun dia memastikan, sejauh ini perseroan masih fokus untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada kisaran Juni ini, dan RUPSLB yang berikutnya.

"Untuk waktu pelaksanaan, kami masih menunggu penentuan dari OJK," papar Yudi kepada *Investor Daily.*

Adapun pada 25 Mei lalu, Bakrieland Development tidak meraih kourum untuk rencana *reverse stock* 10:1 dalam agenda RUPSLB yang kedua. Berdasarkan data mata acara, pemegang saham yang hadir dapat RUPSLB kedua tersebut mewakili kepemilikan saham sebanyak 7.805.360.730 unit saham.

Sedangkan, sebelumnya Yudi menegaskan, dalam RUPSLB pertama itu, pemegang saham yang hadir setara dengan 25,99%. "Jadi kalau di rata-ratakan RUPSLB pertama dan ke-2, pemegang saham yang hadir baru berkisar 44%. Nah, andaikan ingin mencapai kourum, pada RUPSLB pertama perseroan membutuhkan pemegang saham sebanyak 66,67%, atau sebenayak 60% dalam RUPSLB yang kedua," ungkap dia. **(dka)**

Panca Global Kapital akan *Rights Issue* Rp 208 M

JAKARTA - PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *rights issue* minimal Rp 208 miliar. Aksi ini akan direalisasikan setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelum aksi tersebut, perseroan telah terlebih dahulu melaksanakan pemisahan (*spin off*) bisnis sekuritas menjadi anak usaha di bawah PT Panca Global Sekuritas. Perseroan telah mengalihkan sebagian aset dan dan kewajiban kepada anak usaha tersebut.

"Sekarang perusahaan bergerak di lini bisnis konsultan management. Kami akan memfokuskan usaha dengan menjajaki beberapa perusahaan yang menarik, diperbaiki manajemennya, diharapkan *go public* ke depan," ujar Direktur Utama Panca Global Kapital Hendra H Kustarjo di Jakarta, baru-baru ini.

Seiring dengan pemisahan unit bisnis tersebut, dia mengatakan, perseroan membutuhkan dana tambahan untuk melakukan investasi sembali menjajaki peluang investasi yang ada dengan tingkat pengembalian maksimal. Namun demikian, pihaknya belum bersedia mengungkap pengembangan bisnis selanjutnya.

Dia menambahkan, *rights issue* tersebut akan melepas sebanyak 75% saham baru dari kepemilikan saat ini. Semua pemegang saham berencana melaksanakan haknya dan tidak ada investor strategis yang masuk. "Investor sudah *stand by*, tinggal menunggu izin OJK," kata dia.

Saat ini, bertindak sebagai pemegang saham perseroan terdiri atas Hendra sebesar 27,63%, Trisno Limanto selaku direktur perseroan memiliki 28,04%, Farida Eva Riyanti Hutapea selaku komisaris memiliki 12,23%, Patricia Imelda S Hutapea memiliki 9,86%, dan saham yang beredar di publik (*freefloat*) sebesar 22,24%.

Hingga 2017, nilai transaksi efek untuk bisnis perdagangan saham mencapai Rp 14,91 triliun atau turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 17,67 triliun. Piutang margin perseroan juga mengalami penurunan. Perusahaan memiliki pangsa pasar 0,41% dari total transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan jumlah nasabahnya mencapai 914 pihak, sebagian besar terdiri atas *high-network individual*.

Pendapatan perseroan mencapai Rp 30,66 miliar pada akhir tahun lalu, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 23,94 miliar. Laba bersih sebesar Rp 31,63 miliar, dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 24,29 miliar. Aset perseroan jug naik menjadi Rp 379,83 miliar, liabilitas sebesar Rp 131,29 miliar, dan ekuitas sebesar Rp 248,54 miliar. **(eld)**

mustika ratu
BRA Mooryati Soedibyo

PT MUSTIKA RATU, Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Sehubungan dengan dilaksanakannya Pilkada Serentak di Indonesia, maka sesuai dengan iklan pemberitahuan tanggal 21 Mei 2018 di Harian Investor Daily, RUPST yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dirubah menjadi tanggal 28 Juni 2018.

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : Pkl. 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Sasono Wiwoho
Alamat : Jl. Ki. S. Mangunsarkoro No.67-69, Menteng – Jakarta Pusat

Dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Penerimaan dan persetujuan Laporan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penerimaan dan persatujuan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penerimaan dan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(acquit et decharge)* kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan – tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2017;
4. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2018 dan memberikan wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan (Panggilan ini dianggap sebagai undangan) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB di kantor BAE PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 .
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk membawa dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan *fotocopy* anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI juga diminta untuk menyerahkan KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
5. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 telah tersedia di kantor Perseroan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPST dan Para Pemegang Saham dapat memperolehnya dengan mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada *Corporate Secretary* Perseroan.
6. Demi kelancaran pengaturan dan tertibnya RUPST, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta dengan hormat sudah hadir di tempat RUPST sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2018
PT MUSTIKA RATU, Tbk.
Direksi

Mastro 90 Adv.

BSD CITY
BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk.
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
("PERSEROAN")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Waktu : 15:00 – 16:30 WIB
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia
Grand On Thamrin 3, Lobby Level,
Jl. M.H. Thamrin Kav.59,
Jakarta Pusat 10350

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (shares buyback) sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.924.669.600 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham; dan
2. Persetujuan Penambahan Modal tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.924.669.600 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB. Untuk saham - saham yang dititipkan pada penitipan kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Sinar Mas Land Plaza, Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345 ("Kantor Perseroan") dengan bagian Legal Perseroan atau dapat diunduh di situs web Perseroan (http://www.sinarmasland.com/corporate-governance).
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP)/Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat setengah jam sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 05 Juni 2018
PT Bumi Serpong Damai Tbk.
Direksi